

Pelatihan Perpajakan Untuk Guru dan Bendahara MI Muhammadiyah 02 Pekanbaru (MI MUDA)

Jeni Wardi¹, Zulia Khairani², Imran Al Ucok Nasution³

Universitas Lancang Kuning

*Corresponding author

E-mail: zuliakhairani@unilak.ac.id*

Article History:

Received: 14 Mei 2026

Revised: 16 Mei 2026

Accepted: 26 Mei 2026

Abstract: *This community service activity was conducted by lecturers from the Postgraduate School of Lancang Kuning University to improve tax literacy and digital taxation competencies among teachers and treasurers of MI Muhammadiyah 02 Pekanbaru. Schools play a strategic role in developing quality human resources and require accountable financial management, particularly in tax administration. However, many educators and school treasurers still have limited understanding of tax obligations related to BOS fund management and digital tax systems. The training aimed to enhance participants' understanding of school taxation and technical skills in using the Coretax DJP digital taxation system, including NIK activation as a tax identity, e-Bupot, and e-Invoice applications. The program used interactive lectures, discussions, practical simulations, and technical assistance methods. Evaluation results involving 14 participants showed significant improvement in tax administration and reporting competencies, contributing to accountable, transparent, and professional Good School Governance implementation in partner schools.*

Keywords:

Tax Training, BOS Funds, DJP Coretax, Good School Governance

Pendahuluan

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Selain menjalankan fungsi pembelajaran, sekolah juga berperan sebagai entitas administratif yang mengelola berbagai sumber daya, termasuk pengelolaan keuangan yang harus dilakukan secara akuntabel dan transparan (Suryani, 2025). Pengelolaan keuangan sekolah mencakup proses penerimaan, penggunaan, hingga pelaporan dana yang berasal dari berbagai sumber seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), iuran Komite, dan hibah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan sekolah harus menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi sebagai bagian dari tata kelola sekolah yang baik atau *Good School Governance* (Harahap, 2024).

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan sekolah adalah kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Sekolah sebagai penerima dana pemerintah memiliki kewajiban melaksanakan pemotongan dan pelaporan pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, PPh Pasal 23, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi tertentu (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Namun, dalam praktiknya aspek perpajakan di lingkungan sekolah sering kali belum dikelola secara optimal karena keterbatasan pemahaman guru dan bendahara mengenai administrasi perpajakan.

Bagi sekolah penerima Dana BOS, akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi perhatian penting pemerintah. Regulasi terbaru melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 menegaskan bahwa setiap sekolah wajib mencatat dan melaporkan seluruh transaksi keuangan, termasuk kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan prinsip keuangan publik.

MI Muhammadiyah 02 Pekanbaru (MI MUDA) sebagai salah satu sekolah dasar swasta penerima Dana BOS juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Namun, hasil observasi awal menunjukkan masih terdapat kendala dalam pemahaman dan penerapan aturan perpajakan, seperti kesalahan perhitungan pajak, keterlambatan pelaporan, serta kurangnya dokumentasi bukti potong. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang administrasi keuangan dan perpajakan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan pelatihan perpajakan bagi guru dan bendahara sekolah menjadi langkah yang penting. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak secara benar, sekaligus mendukung digitalisasi administrasi perpajakan melalui penggunaan sistem e-Bupot dan e-Faktur (DJP, 2024).

Kegiatan ini juga sejalan dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menekankan kemandirian sekolah dalam mengelola sumber daya secara efektif berdasarkan prinsip *Good School Governance*, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan ini dilaksanakan melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh dosen Universitas Lancang Kuning sebagai upaya meningkatkan kapasitas manajemen keuangan sekolah serta memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

MI Muhammadiyah 02 Pekanbaru sebagai sekolah penerima Dana BOS menghadapi beberapa permasalahan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman guru dan bendahara mengenai kewajiban perpajakan sekolah, termasuk perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, serta PPN.

2. Pencatatan dan pelaporan pajak dalam administrasi keuangan Dana BOS belum optimal sehingga masih terjadi kesalahan bukti potong dan keterlambatan pelaporan.
3. Keterbatasan kemampuan teknis dalam penggunaan sistem perpajakan digital, seperti e-Bupot Unifikasi dan e-Faktur 3.0 yang digunakan dalam pelaporan pajak instansi penerima dana pemerintah (DJP, 2024).

Metode

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui metode ceramah interaktif, pelatihan teknis, dan pendampingan langsung. Metode ini bertujuan meningkatkan pemahaman konseptual serta keterampilan praktis peserta dalam pengelolaan administrasi perpajakan sekolah.

Ceramah interaktif digunakan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai kewajiban perpajakan sekolah, termasuk jenis pajak yang berkaitan dengan pengelolaan dana pendidikan. Materi disampaikan oleh tim dosen Pascasarjana Universitas Lancang Kuning (Unilak) dengan pendekatan diskusi sehingga peserta dapat bertanya dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan keuangan sekolah.

Selanjutnya dilakukan pelatihan teknis dan pendampingan dalam penyusunan dokumen administrasi keuangan dan perpajakan berdasarkan kondisi riil di sekolah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam menghitung, mencatat, dan melaporkan kewajiban pajak secara tepat.

Kegiatan ini melibatkan unsur sekolah yang berperan dalam pengelolaan keuangan, yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab kebijakan keuangan, guru dan bendahara sebagai pelaksana administrasi keuangan dan pelaporan pajak, serta siswa sebagai bagian dari lingkungan pendidikan yang menjadi objek kegiatan pengabdian.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk menilai efektivitas pelatihan. Evaluasi pengetahuan dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta mengenai perpajakan sekolah. Evaluasi keterampilan dilakukan melalui penilaian kemampuan peserta dalam melakukan simulasi pelaporan pajak menggunakan aplikasi perpajakan digital seperti e-SPT, e-Bupot, dan e-Faktur. Selain itu, dilakukan evaluasi implementasi melalui pemantauan dan pendampingan penerapan hasil pelatihan dalam pengelolaan administrasi perpajakan di sekolah mitra.

Hasil

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa Pelatihan Perpajakan untuk Guru dan Bendahara MI Muhammadiyah 02 Pekanbaru (MI MUDA) dilaksanakan di lingkungan MI Muhammadiyah 02 Pekanbaru pada hari Jumat, 23 Januari 2026. Kegiatan ini diikuti oleh guru dan bendahara sekolah sebagai peserta utama, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan serta pelaporan perpajakan sekolah secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning (Unilak) yang diketuai oleh Dr. Jeni Wardi, SE., M.Ak., Ak., CA, serta didukung oleh dosen dan mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi antara tim PKM dan pihak sekolah mitra, khususnya Kepala MI Muhammadiyah 02 Pekanbaru, terkait penentuan waktu pelaksanaan, kesesuaian materi dengan kebutuhan sekolah, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

Sebelum memasuki kegiatan inti, Ketua Tim PKM bersama tim melakukan sesi pengenalan dan diskusi awal (sharing session) dengan peserta mengenai kondisi pengelolaan administrasi dan perpajakan sekolah. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, teridentifikasi bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman peserta terkait kewajiban perpajakan sekolah, khususnya dalam hal pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang bersumber dari Dana BOS. Selain itu, sebagian peserta juga belum memahami mekanisme digitalisasi administrasi perpajakan, terutama terkait integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas perpajakan dalam sistem Coretax DJP.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB dan diawali dengan sambutan dari Kepala MI Muhammadiyah 02 Pekanbaru, Rini Eka Putri, S.Pd, yang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan pelatihan perpajakan di sekolah. Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Ketua Tim PKM, Dr. Jeni Wardi, SE., M.Ak., Ak., CA.

Pada sesi kegiatan inti, materi disampaikan secara bertahap dan sistematis. Materi pertama membahas peran sekolah dalam penerapan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, serta pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan sebagai bagian dari implementasi Good School Governance. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif, disertai diskusi dan tanya jawab, sehingga peserta dapat mengaitkan materi dengan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Materi selanjutnya difokuskan pada digitalisasi administrasi perpajakan, khususnya pengenalan dan praktik penggunaan sistem Coretax DJP. Pada sesi ini, peserta diberikan pemahaman mengenai kebijakan penggunaan NIK sebagai identitas perpajakan (Coretax ID), termasuk mekanisme pendaftaran NIK bagi Wajib

Pajak Orang Pribadi yang belum memiliki NPWP. Tim PKM menjelaskan secara rinci tahapan pendaftaran, mulai dari pengisian data identitas berbasis NIK, proses validasi data, hingga aktivasi NIK sebagai Coretax ID yang dapat digunakan dalam layanan perpajakan digital.

Selain pendaftaran NIK tanpa NPWP, peserta juga diberikan penjelasan mengenai registrasi dan aktivasi NIK bagi pengguna yang sebelumnya telah memiliki NPWP, sehingga NIK dan NPWP dapat terintegrasi dalam satu sistem identitas perpajakan. Materi ini menjadi penting karena menjadi prasyarat dalam penggunaan aplikasi perpajakan digital lanjutan, seperti e-Bupot Unifikasi dan e-Faktur.

Pada sesi praktik, peserta dibimbing secara langsung untuk melakukan simulasi pendaftaran dan pengecekan status NIK pada sistem Coretax, serta praktik penggunaan aplikasi e-Bupot dan e-Faktur berdasarkan contoh transaksi yang relevan dengan kegiatan keuangan sekolah. Pendampingan teknis dilakukan secara intensif agar peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam administrasi perpajakan sekolah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, terlihat adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta, khususnya dalam memahami kewajiban perpajakan sekolah dan penggunaan sistem perpajakan digital berbasis Coretax. Peserta menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung, terutama pada sesi praktik pendaftaran NIK dan simulasi pelaporan pajak. Guru dan bendahara menyatakan bahwa materi Coretax sangat membantu dalam menjawab kendala administratif yang selama ini dihadapi, terutama bagi peserta yang belum memiliki NPWP.

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis guru dan bendahara dalam pengelolaan dan pelaporan perpajakan sekolah, tetapi juga memperkuat kesadaran akan pentingnya tata kelola keuangan sekolah yang transparan, akuntabel, dan berbasis sistem digital. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat di beberapa gambar dan tabel dibawah ini :



Gambar 1. Kata Sambutan dari Kepala Sekolah serta Penjelasan Tujuan Kegiatan dari Ketua



Gambar 2. Pemaparan Materi Oleh Narasumber Pengabdian Masyarakat dan Foto Bersama

Penyampaian materi dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan ceramah interaktif dan diskusi terbuka, sehingga peserta tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Setelah seluruh materi disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan berbagi pengalaman terkait permasalahan nyata yang dihadapi peserta dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan perpajakan sekolah.

Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai guru dan bendahara sekolah. Untuk menjaga kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban selama kegiatan berlangsung, strategi yang digunakan adalah dialog interaktif pada setiap sesi materi, khususnya pada pembahasan kewajiban perpajakan sekolah, penggunaan aplikasi perpajakan digital, serta pendaftaran dan registrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Coretax ID, baik bagi peserta yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP.

Tahap pengamatan secara mendalam dan komprehensif (monitoring) serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mengukur capaian program, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan (kompetensi) peserta di bidang perpajakan sekolah. Monitoring partisipasi peserta dilakukan sejak awal kegiatan hingga penutupan pelatihan. Hasil monitoring menunjukkan bahwa setiap materi yang disampaikan oleh tim PKM mendapatkan respon aktif dari seluruh peserta.

Keaktifan peserta terlihat secara jelas pada sesi diskusi dan praktik, terutama saat pembahasan prosedur pendaftaran NIK pada sistem Coretax DJP tanpa NPWP, proses registrasi dan aktivasi NIK sebagai identitas perpajakan, serta simulasi penggunaan aplikasi e-Bupot dan e-Faktur. Peserta aktif mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kendala administrasi perpajakan yang selama ini dihadapi di sekolah. Narasumber memberikan penjelasan disertai contoh kasus yang relevan sehingga materi mudah dipahami dan aplikatif.

Sebagai bagian dari evaluasi kegiatan, tim PKM melakukan pengukuran tingkat pemahaman peserta melalui penyebaran kuesioner kepada 14 orang peserta, yang terdiri dari guru dan bendahara MI Muhammadiyah 02 Pekanbaru. Kuesioner diberikan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui perubahan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta. Hasil evaluasi tersebut dirangkum sebagai berikut.

Tabel 1. Tingkat Pengetahuan Peserta Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan PKM

No.	Pertanyaan	Sebelum			Sesudah		
		Ya	Tidak	%	Ya	Tidak	%
1	Saya memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan untuk menjalankan tugas saya.	6	8		14	0	
2	Saya yakin bahwa saya dapat mengaplikasikan pengetahuan perpajakan dalam pekerjaan saya.	5	9		14	0	
3	Saya memahami peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.	4	10		14	0	
4	Saya ingin meningkatkan pengetahuan saya tentang perpajakan.	3	11		14	0	
5	Saya memiliki kemampuan untuk mengelola perpajakan dengan efektif.	4	10		14	0	
6.	Saya memahami konsep pajak penghasilan (PPh).	3	11		14	0	
7	Saya memiliki kemampuan untuk menghitung pajak dengan akurat.	7	7		14	0	
8.	Saya memahami peraturan perpajakan yang terkait dengan pekerjaan saya.	8	6		14	0	

Berdasarkan hasil evaluasi kuesioner yang disebarkan kepada peserta, terlihat bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan PKM, sebagian besar peserta masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait kewajiban perpajakan sekolah serta penggunaan sistem perpajakan digital berbasis Coretax. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat persetujuan peserta terhadap pernyataan kuesioner yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, keyakinan dalam mengaplikasikan pengetahuan tersebut, pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, serta kemampuan mengelola dan menghitung pajak secara akurat. Sebagian besar responden pada tahap pra-kegiatan berada pada kategori *Sangat Tidak Setuju* dan *Tidak Setuju*.

Namun, setelah kegiatan PKM dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan pada seluruh indikator yang diukur. Peningkatan tersebut tercermin dari pergeseran jawaban peserta ke kategori *Setuju* dan *Sangat Setuju* pada pernyataan kuesioner pasca-kegiatan, khususnya terkait pengetahuan perpajakan untuk menjalankan tugas, kemampuan mengaplikasikan pengetahuan perpajakan dalam pekerjaan, pemahaman peraturan perpajakan yang berlaku, serta kemampuan mengelola perpajakan sekolah secara efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri peserta

dalam pengelolaan perpajakan sekolah, sebagaimana ditunjukkan pada tabel hasil evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini dapat dinyatakan berhasil, karena peserta tidak hanya memahami konsep dasar perpajakan sekolah, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam praktik, khususnya dalam pendaftaran dan registrasi NIK pada sistem Coretax DJP serta penggunaan e-Bupot dan e-Faktur. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penerapan Good School Governance yang akuntabel, transparan, dan profesional di lingkungan sekolah mitra.

Diskusi

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pelatihan perpajakan berbasis digital mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru serta bendahara sekolah dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Peningkatan ini terlihat dari hasil evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan, di mana peserta menunjukkan perubahan pemahaman yang signifikan terhadap konsep perpajakan, kemampuan menghitung pajak, serta penggunaan aplikasi digital seperti e-Bupot, e-Faktur, dan Coretax DJP. Temuan ini sejalan dengan pendapat Direktorat Jenderal Pajak (2024) bahwa digitalisasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi pelaporan pajak. Selain itu, metode pelatihan yang menggabungkan ceramah interaktif, diskusi, dan praktik langsung terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi peserta karena memberikan pengalaman belajar yang aplikatif dan kontekstual.

Keberhasilan program ini juga menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung tata kelola sekolah yang akuntabel dan transparan. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta masih mengalami keterbatasan dalam memahami regulasi perpajakan dan penerapan sistem digital perpajakan. Namun setelah pelaksanaan kegiatan, peserta menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan administrasi perpajakan sekolah. Kondisi ini mendukung konsep Good School Governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan sekolah. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Harahap (2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, pelatihan perpajakan digital perlu dilakukan secara berkelanjutan agar sekolah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi perpajakan dan transformasi digital administrasi keuangan sekolah.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa pelatihan perpajakan di MI Muhammadiyah 02 Pekanbaru telah terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan

yang ditetapkan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan guru serta bendahara sekolah dalam pengelolaan kewajiban perpajakan, khususnya terkait pendaftaran dan registrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Coretax ID, serta penggunaan aplikasi perpajakan digital e-Bupot dan e-Faktur.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta secara signifikan setelah pelatihan, yang mencerminkan efektivitas metode ceramah interaktif, diskusi, dan praktik langsung. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penerapan tata kelola keuangan sekolah yang akuntabel, transparan, dan profesional sesuai dengan prinsip Good School Governance.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, disarankan agar pelatihan perpajakan berbasis digital, khususnya terkait sistem Coretax DJP, dilakukan secara berkelanjutan dan periodik guna menyesuaikan dengan perkembangan regulasi perpajakan. Selain itu, diperlukan pendampingan lanjutan agar sekolah mitra mampu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh secara konsisten dalam praktik administrasi perpajakan sehari-hari.

Daftar Referensi

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Panduan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Bendahara Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *e-Bupot dan e-Faktur 3.0: Sistem Pelaporan Pajak Digital Terintegrasi*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Harahap, R. A. (2024). *Pengelolaan Keuangan Dalam Peningkatan Pelayanan Pendidikan Di SMP Bakti Nusantara Tangerang Selatan, Banten* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS*. Jakarta.
- Sartika, S. (2023). *Analisis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMP Negeri 1 Lakea Kabupaten Buol* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).
- Suryani, S. (2025) Perencanaan Pendidikan Di Sekolah. *Administrasi Pendidikan*, 12(2), 42.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.